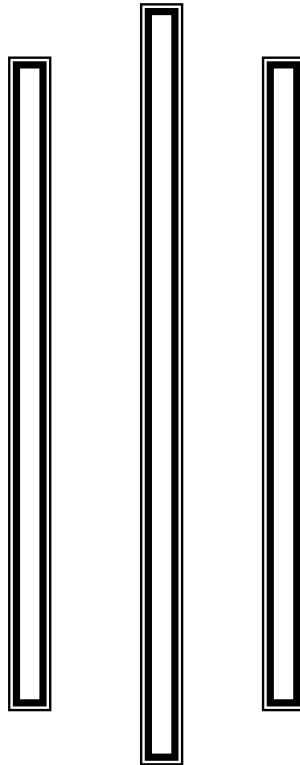




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS SOSIAL**

Jln. Andi Pangerang Pettarani No. 59, Telp. (0411) 452971 Fax. (0411) 452317
MAKASSAR 90222

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata.

Dalam rangka mencapai tujuan dan memenuhi amanat sesuai aturan yang berlaku, pemerintah berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan setiap tahun. Secara umum perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama satu tahun anggaran dengan sendirinya harus memerhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan pada masa yang akan datang.

Proses Rencana kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada Renstra Dinas Sosial 2024-2026 dengan tetap memerhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen rancangan awal tahun 2024 agar pelaksanaan program/ kegiatan bersinergi antar dokumen perencanaan.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi.

1.2 DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Keputusan Menteri Koordinator PMK nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Sosial untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kesejahteraan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada Bab I terdapat pendahuluan yang terdiri dari **Latar Belakang** yang memuat pengertian ringkas Renja, Proses Penyusunan Renja dan ketekaitan antara Renja dengan dokumen RKPd. **Landasan Hukum** yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Lalu, **Maksud dan Tujuan** disusunnya Renja dan **Sistematika Penulisan** Renja.

Pada Bab II terdapat Hasil evaluasi Renja Tahun Lalu yang terdiri dari **Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD** yang berisi review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan serta pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. **Analisis Kinerja Pelayanan OPD** yang berisi gambaran umum pelayanan OPD, Capaian Kinerja OPD dan SPM serta IKK pelayanan OPD. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD** yang berisi sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. **Review terhadap Rancangan Awal RKPd** yang berisi proses yang membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan. Dan **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat** yang berisi penjelasan tentang proses bagaimana usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh.

Pada Bab III terdapat Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah terdiri dari **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional** yang berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. **Tujuan dan Sasaran Renja** yang berisi perumusan tujuan dan sasaran renja yang dikatkan dengan sasaran target Renstra.

Pada Bab IV terdapat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

Pada Bab V terdapat Penutup yang berisi mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk melalui penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk tahun 2023 Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan 6 Program, 14 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran rencana strategis dengan anggaran sebesar Rp. 49.981.924.673,- dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 48.841.805.695,- atau 97.72% dari total pagu anggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan pada Tabel T-C 29 dibawah ini :

TABEL T-C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S/D TAHUN 2024 (5+7+9)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (10/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	100%	100%	-	-		100%		
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%	-	-		100%		
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	70 Kegiatan	-	-		70 Dokumen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	70 Dokumen	70 Kegiatan	-	-		70 Dokumen		

Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang								
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan Kemampuan dari yang ditargetkan	100%	1331 Orang	-	-		100%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang	300 Orang	-	-		200 Orang		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	100 Keluarga	1031 Orang	-	-		100 Keluarga		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	200 Lembaga	-	-	-		200 Lembaga		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	300 Orang	174 Orang	300 Orang	256 Orang		300 Orang		
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan kedaerah	300 Orang	174 Orang	300 Orang	256 Orang		300 Orang		

Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	kabupaten/kota asal								
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	300 Orang	174 Orang	300 Orang	256 Orang		300 Orang		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	100%	100%	100%	100%		100%		
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%	100%	100%	100%		100%		
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%	100%	100%	100%		100%		
	Persentase LanjutUsia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%	100%	100%	100%		100%		
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	100%	100%	100%	100%		100%		

	dalam panti (SPM)								
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	115 Orang	70 Orang	115 Orang	-		115 Orang		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	20 Orang	45 Orang	-		45 Orang		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-		50 Orang		
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 Orang	-	20 Orang	-		20 Orang		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		2 Dokumen		
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		
Penyediaan	Jumlah Orang yang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		

Sandang	Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi								
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang		215 Orang		
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	60 Orang	75 Orang	60 Orang	1		60 Orang		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	60 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang		

	Provinsi								
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang		
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang		
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang		12 Orang	12 Orang		12 Orang		
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)	60 Orang	50 Orang	60 Orang	-		60 Orang		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	210 Kali	60 Orang	-		60 Orang		
Koordinasi,Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		2 Dokumen		

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan dalam panti	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		

	Kewenangan Provinsi								
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		2 Dokumen		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	100%	3,60%	100%	100%		100%		
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI sesuai kewenangan provinsi	50 Orang	38 Orang	50 Orang	43 Orang		50 Orang		
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	50 Orang	38 Orang	50 Orang	43 Orang		50 Orang		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan	100%	820 Orang	100%	100%		100%		

	Kesejahteraan Sosial)								
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	400 Keluarga	400 Orang	400 Keluarga	400 Keluarga		400 Keluarga		
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	400 Keluarga	300 Keluarga	400 Keluarga	24 Kab/Kota		400 Keluarga		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	110 Orang	140 UEP	110 Orang	70 Orang		110 Orang		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	100%	100%	100%	100%		100%		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	3700 Orang	29938 Orang	3700 Orang	5900 Orang		3700 Orang		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	3000 Orang	26921 Orang	3000 Orang	-		3000 Orang		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	500 Orang	2917 Orang	500 Orang	-		500 Orang		

	dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi								
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	100 Orang	200 orang	5900 Orang		200 orang		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%		100%		
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	2 Makam	2 TMP/MPN	2 Makam	2 Makam		2 Makam		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	2 TMP/MPN	2 Makam	2 Makan		2 Makam		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	90 Nilai	100%	90 Nilai	90 Nilai		90 Nilai		
	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	97.2 Nilai	100%	97.2 Nilai	97.2 Nilai		97.2 Nilai		
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	15 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen		19 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	-	7 Laporan	-		7 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		6 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Laporan	330 Orang	30 Laporan	30 Laporan		30 Laporan		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/Bulan	330 Orang	330 Orang/Bulan	330 Orang/Bulan		330 Orang/Bulan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	1 Tahun	18 Laporan	18 Laporan		18 Laporan		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-		12 Dokumen		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	330 Orang	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	330 Orang	1 Paket	1 Paket		1 Paket		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	61 Unit	1 Kantor Dinas	61 Unit			61 Unit		
	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	1000 Orang	-	1000 Orang			1000 Orang		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	18 Komponen	10 Paket	10 Paket		10 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Tahun	10 Paket	-		10 Paket		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31 Paket	1 Tahun	31 Paket	31 Paket		31 Paket		

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Tahun	10 Paket	10 Paket		10 Paket		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	24 Kab/Kota	300 Laporan	300 Laporan		300 Laporan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	104 Orang	24 Laporan	24 Laporan		24 Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Kantor	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104 Orang	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	158 Unit	1 Tahun	158 Unit			158 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	1 Tahun	7 Unit	7 Unit		7 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7 Unit	-	7 Unit	-		7 Unit		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	1 Tahun	110 Unit	110 Unit		110 Unit		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Tahun	1 Unit	-		1 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Aplikasi	3 Unit	-		3 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	-	30 Unit	-		30 Unit		

Pada awal tahun 2023 Sebanyak 6 Program yang realisasinya fisik nya sudah Memenuhi (100%), Adapun ada Program Pemberdayaan Sosial tidak ada dikarenakan adanya hasil Evaluasi Mendagri.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program / kegiatan untuk mencapai target kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai dan dapat melakukan koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021- 2023. Keberhasilan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel.T-C.30 berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian SDGs Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline (2022)	Satuan	Target Pencapaian	Capaian
					2023	2023
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN						
TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas sosial	100%	%	100%	100%
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	364,414	KPM	366,129	323,599
TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	100%	%	100%	100%
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	100%	Jiwa	PM	100%

Pada Tabel 2.1 mengenai Capaian SDGs, Dari 4 Indikator yang menjadi target pencapaian SDGs oleh Dinas Sosial terdapat 4 Indikator yang seluruhnya tercapai. Adapun factor pendorong pada indicator 1.3.1(c) yaitu Komitmen Kepala Daerah terhadap Pemenuhan Hak Disabilitas, Aspek SDM terdiri dari dari SLRT, PSM, Puskesmas, TKSK dan Pendamping PKH. Lalu factor pendorong pada indicator 1.5.1(b) dan 1.5.1 (c) yaitu Koordinasi yang cepat dari pemerintah setempat ke Dinas Sosial ketika terjadi Bencana, Kemajuan Teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi bencana, dan Tagana yang selalu siap 1 x 24 jam pada saat tanggap darurat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis menggambarkan permasalahan yang lagi marak terjadi di masyarakat. Isu-isu yang muncul menjadi penyebab juga munculnya masalah-masalah sosial terutama di Indonesia. Masalah-masalah sosial ini dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial menyebut ada 7 (tujuh) kelompok kesejahteraan sosial yaitu seperti kemiskinan; keterlantaran; keterpencilan; kecacatan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; kebencanaan; dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Ketujuh kelompok ini disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang di tangani dan dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai- nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, maka isu strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :
 - Perlunya peningkatan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
 - Perlunya peningkatan dukungan, keahlian, disiplin dan etos kerja aparat;
 - Perlunya peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai;
 - Perlunya peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.

Untuk itu, optimalisasi fungsi dan peran dinas dilakukan melalui upaya pengembangan kemampuan institusi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja; peningkatan keahlian, disiplin dan etos kerja aparat; peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas; serta peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.

2. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Sosial, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

- Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk itu, peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat; penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah; pengembangan perangkat dan jaminan kepastian hukum atau legalisasi; serta pengembangan standarisasi pelayanan. Prinsip dasar dalam upaya ini adalah pengintegrasian pembangunan kesejahteraan sosial dengan pembangunan sektor lainnya, khususnya ekonomi dan politik yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial, bahkan justru sering menjadi sumber permasalahan sosial. Disamping itu, prinsip pendekatan pengembangan modal sosial (social capital) yang dimiliki masyarakat harus diupayakan, mengingat sangat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang berkembang semakin kompleks.

3. Kemitraan Sinergis Pengembangan Pelayanan Sosial, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

- Belum optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk itu, kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial diupayakan melalui pengembangan jejaring kerjasama, kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan dalam peningkatan pelayanan sosial antara Pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat dan dunia usaha; pengembangan partisipasi sosial dalam perumusan dan pengambilan keputusan untuk peningkatan pembangunan sosial; serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya perbaikan dan penanggulangan masalah sosial.

Adapun permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah. Penjabaran permasalahan dalam fokus pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga diperoleh efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi pada bidang sosial berdasarkan evaluasi program kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Rumusan Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Program Kegiatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih Tingginya Jumlah Penduduk miskin	Tingginya jumlah penduduk miskin yang menganggur	<ul style="list-style-type: none"> • Akses untuk pengembangan kompetensi terbatas • Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah. • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat • Rendahnya pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor usaha menengah. • Masih tingginya persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan
		Sulitnya Data Kemiskinan yang Valid	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya akses data by name by address kemiskinan dari Kementerian. • Masih adanya perbedaan data kemiskinan yang di release oleh kementerian lain • Sulitnya memilah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2	Semakin Intensnya Jumlah Kejadian Bencana	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan

		Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Bencana	<p>bencana yang belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Dinas Sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan dan partisipasi PSKS • Sulit menggerakkan personil ketika terjadi Bencana karena Tagana merupakan Relawan yang tidak terikat di Dinas Sosia • Intensitas Kejadian Bencana tinggi sehingga Logistik tidak mencukupi
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang masih terbatas	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya dalam pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan kemampuan pelayanan • Masih rendahnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan pelayanan
4	Pemulangan dan Penanganan Warga Negara Migran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	Penanganan Klien dengan Kondisi Khusus baik itu pendampingan menuju daerah asal dan penjemputan dari titik rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Klien tidak dapat melakukan perjalanan pemulangan ke daerah asal secara mandiri dikarenakan kondisi tertentu, seperti sakit ataupun disabilitas • Tidak adanya anggaran pendampingan pemulangan di lokasi atau provinsi yang menjadi tempat rujukan awal klien • Tidak adanya anggaran pendampingan maupun penjemputan bagi klien

			bermasalah di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
		Potensi pemberian pelayanan pemulangan berulang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya skema/ sistem perekaman secara elektronik terhadap klien penerima pelayanan pemulangan orang terlantar
		Ketidakpastian identitas calon penerima pelayanan pemulangan ke daerah asa	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya skema/ sistem pelacakan terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pelayanan penyediaan tiket perjalanan yang memerlukan persyaratan khusus berdasarkan kebijakan satuan tugas penanganan covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan kebijakan transportasi dalam masa covid-19 berupa sertifikat vaksin booster
		Sarana dan prasarana penampungan bagi klien penerima layanan pemulangan ke daerah asal	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran penyediaan sarana MCK berupa paket ametys maupun P3K belum dapat diakomodir
5	Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya	Program penanganan permasalahan narkoba dan zat adiktif lainnya melalui program-program preventif	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian regulasi mengenai kewenangan pemerintah daerah membuat ketersediaan anggaran penanganan permasalahan narkoba dan zat adiktif lainnya belum mendapatkan perhatian dan diakomodir secara berkesinambungan
		Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN belum sepenuhnya dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkannya anggaran dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan pencegahan yang tertuang dalam inpres

			<p>tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isu pencegahan dan penyalahgunaan narkoba belum menjadi sebuah hal yang dianggap prioritas ketimbang permasalahan sosial lainnya
--	--	--	--

Adapun identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman isu strategis berdasarkan hasil Focus Discussion Group (FGD) di Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. STRENGTH (KEKUATAN)

a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

- Penyatuan data DTKS & P3KE dan koordinasi tim TKPKD Kab/Kota dengan tim TKPKD Provinsi serta SENTRA/Balai.
- SDM dan Kerja sama Relawan Sosial
- Penguatan Entrepeneurship
- Sudah terbentuk dan aktifnya operator SIKS-NG di setiap desa dan kelurahan
- Tersedianya anggaran dan program untuk penanganan masalah kemiskinan ekstrim
- Dukungan yang optimal dari pimpinan perangkat daerah

b. Pemulangan Warga Negara Migran, Terlantar, dan Korban Tindak Kekerasan

- Kesiapan Dinas Sosial Provinsi dalam memulangkan warga negara ke daerah asalnya.

c. Inklusivitas Disabilitas

- Komitmen Kepala Daerah terhadap Pemenuhan hak disabilitas.
- Aspek keuangan bersumber dari prioritas RPD, BAZNAS, CSR, Bantuan Keuangan dari Pusat, Provinsi, Kab/Kota.
- Aspek SDM terdiri dari SLRT, PEKSOS, PUSKESOS, TKSK, Pendamping PKH
- Aspek regulasi terdiri dari Inpres No.4, PP No.2/Permensos No.4/Permendagri 90,18,59

d. Penanganan Bencana

- Buffer Stock logistik dari Provinsi selalu tersedia

- TAGANA yang selalu siap 1x24 jam pada saat tanggap darurat
 - Koordinasi yang cepat dari pemerintah setempat ke Dinas Sosial ketika terjadi bencana dan jumlah jiwa yang terdampak bencana.
 - Pendampingan Psikososial
 - Kemajuan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi bencana
 - Adanya kemudahan pengajuan dan pencairan dana bantuan yang diajukan ke BKAD
- e. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
- SDM di OPD mendukung penerapan SPM

2. WEAKNESS (WEAKNESS)

- a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
- Data DTKS yang belum valid
 - Bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran
 - Data DTKS & P3KE di Kab/Kota masih belum sinkron
 - Indikator P3KE mencakup keberadaan sanitasi dan stunting, sedangkan di DTKS belum ada
 - Data belum padan di DISDUKCAPIL
 - Operator sudah mengirimkan usulan graduasi tetapi belum dirubah/diganti
 - Musawarah Desa/Kelurahan untuk dilakukannya graduasi tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa/Kelurahan, sebab faktor politik kekeluargaan.
 - Regulasi penghapusan kemiskinan ekstrim di kabupaten/kota masih belum optimal karena waktu yang sangat singkat.
 - Lambatnya koordinasi dengan pemerintah desa mengenai laporan data
 - Keterbatasan rencana strategis masing-masing OPD yang menjadi TKPKD di Kab/Kota
- b. Pemulangan Warga Negara Migran, Terlantar, dan Korban Tindak Kekerasan
- Kurangnya fasilitas dan edukasi tentang pemulangan
 - Kesadaran masyarakat tentang UU imigrasi belum memadai
 - SDM belum maksimal
 - SOP masih perlu diperbaiki dan belum adanya surat edaran tentang penyusunan SOP Pemulangan

- Perjanjian kerjasama lintas sektor belum jelas.
- Belum adanya rumah singgah di beberapa kab/kota.

c. Inklusivitas Disabilitas

- Organisasi disabilitas masih belum terkoordinir sehingga pemerintah masih kesulitan dalam pembinaan
- Belum semua kab/kota memiliki regulasi pemenuhan kebutuhan disabilitas sehingga legitimasi sangat rendah
- Tidak semua disabilitas memiliki akses ke dalam komunitas

d. Penanganan Bencana

- Asesmen yang dilakukan TAGANA belum berbasis BNBA bagi yang terdampak bencana
- Alokasi bantuan masih terbatas
- Sarana & Prasarana Dapur Umum masih kurang
- Kurangnya koordinasi BPBD dengan Dinsos dalam penanganan bencana
- Pelatihan untuk TAGANA masih kurang atau belum rutin dilakukan
- Kurangnya SDM TAGANA

e. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

- Regulasi turunan terkait SPM di Kab/Kota belum ada
- Kurangnya BIMTEK untuk penerapan SPM
- Sarana & Prasarana terkait SPM masih kurang
- Dukungan anggaran masih rendah
- Rendahnya pemahaman bidang teknis terkait indikator SPM
- Terlalu tingginya capaian SPM (target)

3. OPPORTUNITY (PELUANG)

a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

- Peran swasta dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM
- Peran keluarga dan lingkungan sekitar
- Adanya organisasi masyarakat yang ikut membantu penanganan kemiskinan

- Aspek keuangan = BAZNAS, CSR, INDUSTRI & PERBANKAN
 - Tersedianya peksos terampil alumni STKS, SLRT, PUSKESOS, TKSK, TAGANA
 - Adanya PERDA tentang perlindungan Sosial
 - Semangat kerja sama masyarakat yang masih tinggi
 - Dukungan sumber daya alam pertanian yang tersedia
- b. Pemulangan Warga Negara Migran, Terlantar, dan Korban Tindak Kekerasan
- Tersedianya tempat penampungan sementara
 - Kerja sama yang baik dengan pemerintah desa/kel dengan bersedia menerima warga negara yang dipulangkan
 - Adanya dukungan BUMN HIMBARA / Perusahaan Swasta dalam memberikan jaminan sosial
- c. Inklusivitas Disabilitas
- Adanya lembaga khusus disabilitas yang berbadan hukum
 - Pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan keterlibatan instansi terkait
 - Bantuan CSR kepada disabilitas
 - Adanya Perda No.2 tahun 2018 tentang pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas
 - Tersedianya lapangan usaha untuk disabilitas
 - Tersedianya akses pendidikan yang layak
- d. Penanganan Bencana
- Penyediaan anggaran melalui BTT
 - Tersedianya sarana & prasarana penanganan bencana
 - Petugas TGANA terlatih
 - Keterlibatan sejumlah stakeholder dalam penanganan bencana
 - Pendampingan psikososial dari lembaga atau instansi lain
 - Rasa kekeluargaan masyarakat yang masih erat antara satu sama lainnya
 - Semakin banyak kelompok-kelompok pecinta alam dan pemerhati lingkungan
- e. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
- CSR dapat dimanfaatkan untuk mendukung capaian SPM Daerah

- Adanya dukungan PSKS dalam mendorong pencapaian SPM
- Penerapan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaporan SPM
- Penganggaran yang optimal untuk menerapkan SPM secara maksimal

4. TREATH (ANCAMAN)

a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

- Kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrim belum optimal karena ego sektoral dan kurangnya pemahaman terkait regulasi.
- Kondisi geografis menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- Adanya stigma atau mindset oleh sebagian masyarakat yang sudah terbiasa menerima bantuan sosial dari pemerintah atau swasta sehingga mereka tidak ingin keluar dari garis kemiskinan.

b. Pemulangan Warga Negara Migran, Terlantar, dan Korban Tindak Kekerasan

- Warga Negara Migran tidak ingin pulang ke daerahnya.
- Korban Kekerasan kurang terbuka dalam menceritakan permasalahannya
- Tidak adanya keberlanjutan penanganan dari pemerintah daerah asalnya sehingga warga negara migran yang telah dipulangkan kembali lagi ke daerah perantauannya.

c. Inklusivitas Disabilitas

- Sebagian daerah tidak memiliki organisasi perhimpunan disabilitas.
- Adanya perhimpunan disabilitas yang tidak mendaftarkan organisasinya ke Dinas Sosial.
- Kurangnya support system dari orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitasnya.
- Kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk menerapkan lingkungan ramah disabilitas, khususnya di daerah terpencil.
- Kurangnya pemahaman sektor pemberi kerja terhadap hak-hak disabilitas dan regulasi tentang pendayagunaan tenaga kerja disabilitas.

d. Penanganan Bencana

- Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga kurang optimalnya tim tanggap darurat bencana dalam melakukan persiapan.
- Faktor wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk memberikan bantuan kepada korban bencana.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap siapa yang lebih prioritas dalam mendapatkan bantuan.
- Jenis bantuan yang disalurkan oleh organisasi masyarakat kepada korban bencana tidak sesuai dengan kebutuhannya.

e. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

- Target SPM yang terlalu tinggi
- Indikator penilaian SPM terlalu banyak
- Pemahaman swasta yang masih sedikit tentang penerapan CSR yang mendukung pemenuhan SPM yang dilaksanakan pemerintah daerah
- Dukungan TAPD terhadap pencapaian SPM Bidang sosial yang masih belum optimal

Berdasarkan telaah tersebut diatas maka ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Penanganan dan Pelayanan Anak Terlantar
3. Pelayanan Lanjut Usia Terlantar
4. Penanganan dan Pelayanan Tuna Sosial
5. Penanganan dan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial
6. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
7. Peningkatan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut ini:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan system pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam system, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa Stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait.

Usulan Program/Kegiatan dari para Stakeholder pada saat Rakortek/ Berita Acara Rakortekbang Forum Lintas Daerah & Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diinput ke dalam SIPD yang akan ditelaah Kembali oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dan akan menyesuaikan dengan anggaran serta kebutuhan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Usulan Program dan Kegiatan oleh Dinas Sosial Kab/Kota Se Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut ini:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka pada tanggal 5 Desember 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru pada bagian kesatu mengamanahkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, sehubungan dengan hal tersebut maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang periode Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi Panduan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Perda tentang RPJMD Prov. Sulsel.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelerasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis actual.

Pencapaian SDGs Dinas Sosial dan SPM Bidang Sosial juga turut mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung pencapaian target SDGs adalah “Terlaksananya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” yang meliputi Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas dan Korban Bencana Sosial. Kemudian pencapaian target SDGs juga tidak lepas dari peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pendamping PKH, Tagana dan Tenaga Pelopor Perdamaian yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun juga dengan SPM Secara jelas kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menggambarkan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang mencakup empat jenis pelayanan dasar yakni Pelaksanaan Program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Gubernur Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sesuai dengan misi Renstra Dinas Sosial 2024-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026. Adapun Tujuan RPD yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (TUJUAN I) dan Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (TUJUAN III), lalu Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

2. Meningkatkan taraf pelayanan serta pemenuhan kebutuhan hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. Sasaran

Adapun Tujuan RPD yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (TUJUAN I) dengan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (SASARAN 1) serta Optimalnya Kualitas pelayanan publik (SASARAN 2) dan Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (TUJUAN III) dengan sasaran Menurunkan kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat (SASARAN 6), lalu Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial ada 3 (Tiga) yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatnya Pelayanan serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial

1. Sasaran 1 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah
 - b. Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
 - c. Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti
 - d. Nilai saki OPD
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Sasaran 2 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya Pelayanan serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Peningkatan Pendapatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - b. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial setelah mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
3. Sasaran 3 Rencana Strategis Dinas Sosial "Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Cakupan Peningkatan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- **Pencapaian SDGs**

SDGs bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh Negara baik negara maju, negara berkembang, dan Negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs, tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai langkah yang telah diupayakan berkaitan dengan pencapaian target SDGs selama periode 2024-2026 yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

Tabel 4.1
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian		
				2024	2025	2026
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN						
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas sosial	%	100%	100%	100%
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	KPM	365.504	365.504	365.504
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	%	100%	100%	100%
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	%	100%	100%	100%

Untuk Indikator 1.3.1(c), 1.5.1(d) dan 1.5.1(c) ditargetkan tahun 2024 – 2026 sebesar 100% sesuai kewenangan SPM. Dan juga untuk indicator 1.3.1(d) disesuaikan dengan capaian Tahun 2023 adapun akan ada Perubahan target di kemudian hari sesuai dengan Kewenangan Kementerian Sosial.

- Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Sulawesi Selatan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi masyarakat miskin dapat lebih mudah dalam mengakses bantuan social. Penurunan angka kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan memfokuskan program terkait penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan semakin menurun.

Selain angka kemiskinan yang telah diurai di atas, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Provinsi Sulawesi Selatan secara Nasional menempati urutan ke 8 dalam jumlah keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. dengan jumlah keluarga 724.541 keluarga atau 3.225.310 orang

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bias dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Program dan Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang setiap OPD wajib menyusun SPM sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut

SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar berupa standar pelayanan dasar yang diberikan kepada PPKS. Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018,

untuk melaksanakan SPM tersebut masing - masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial pada tahun 2024 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
 2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial pada tahun 2024 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
 3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial pada tahun 2024 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
 4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial pada tahun 2024 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi pada tahun 2024 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
- Disabilitas

Disabilitas diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi dengan presentase penyandang disabilitas paling tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain yaitu sebesar 2,78% jiwa. Dilihat dari sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan ragam Disabilitas, kota Makassar menjadi kabupaten/kota dengan perkiraan jumlah penyandang disabilitas terbesar mencapai 30.373 jiwa atau 12,286%. Sebaran penyandang disabilitas berdasarkan ragam ini cukup beragam antar kabupaten/kota yang didominasi oleh ragam sensorik diantaranya itu gangguan penglihatan, pendengaran dan lain-lain.

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 7 Program, 18 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 59.555.748.261,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 disajikan dalam tabel T-C. 33 sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang Sosial yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya dan Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Tindak Lanjut pada Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Sebagai Berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesejahteraan Sosial.
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesejahteraan Sosial yang masih memerlukan upaya keras.

3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial.
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyesuaian penyelesaian permasalahan Sosial dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Plt. KEPALA DINAS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Malik Faisal', is written over a yellow rectangular stamp. The signature is stylized and cursive.

ABD. MALIK FAISAL, S.H.,M.Adm.Pemb
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19670403 199703 1 007

No	Indikator (2021-2023)	Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050-5889 (2023-2024)	SPM	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Catatan Penting
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2				4	5	6	7	8		10
	Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba				100 Anak	100 Anak	100 Anak	50 Anak	100 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSBR Makkareso Maros				110 Anak	110 Anak	110 Anak	55 Anak	110 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSBR Makkareso Maros				70 Anak	70 Anak	70 Anak	35 Anak	70 Anak	-	
	Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSRA Seroja Bone				80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak Balita Yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti PPRS Inang Matutu Makassar	Jumlah peserta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi			65 Anak	65 Anak	65 Anak	65 Balita	65 Anak	65 Balita	
	Jumlah Anak terlantar Yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba				100 Anak	100 Anak	100 Anak	50 Anak	100 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak terlantar Yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti PPSBR Makkareso Maros				110 Anak	110 Anak	110 Anak	55 Anak	110 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak jalanan Yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial panti PPSBR Makkareso Maros				70 Anak	70 Anak	70 Anak	35 Anak	70 Anak	-	
	Jumlah Anak jalanan Yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti PPRS Seroja Bone				80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak Balita yang mendapat bimbingan keterampilan dalam panti PPRS Inang Matutu Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi			65 Balita	65 Balita	65 Balita	65 Balita	65 Balita	65 Balita	
	Jumlah Anak terlantar yang mendapat bimbingan keterampilan dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba				100 Anak	100 Anak	100 Anak	50 Anak	100 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak terlantar yang mendapat bimbingan keterampilan di dalam panti PPSBR Makkareso Maros				110 Anak	110 Anak	110 Anak	55 Anak	110 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak jalanan yang mendapat bimbingan keterampilan dalam panti PPSBR Makkareso Maros				70 Anak	70 Anak	70 Anak	35 Anak	70 Anak	-	
	Jumlah Anak jalanan yang mendapat bimbingan keterampilan dalam panti PPRS Seroja Bone				80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak Balita Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPRS Inang Matutu Makassar	Jumlah orang Yang mendapatkan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi			65 Balita	65 Balita	65 Balita	65 Balita	65 Balita	65 Balita	
	Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba				100 Anak	100 Anak	100 Anak	50 Anak	100 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSBR Makkareso Maros				110 Anak	110 Anak	110 Anak	55 Anak	110 Anak	50 Anak	
	Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSBR Makkareso Maros				70 Anak	70 Anak	70 Anak	35 Anak	70 Anak	-	

No	Indikator (2021-2023)	Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050-5889 (2023-2024)	SPM	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Catatan Penting
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2				4	5	6	7	8		10
	Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPRSA Seroja Bone				80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	80 Anak	50 Anak	
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)				75 orang / 1 Tahun	75 orang / 1 Tahun	75 orang / 1 Tahun	75 orang / 1 Tahun	75 orang / 1 Tahun	60 Orang	
	Jumlah lanjut usia Yang terpenuhi kebutuhan pangan dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Provinsi			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	60 Orang	
	Jumlah lanjut usia Yang terpenuhi kebutuhan sandang dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Provinsi			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	60 Orang	
	Jumlah lanjut usia Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	60 Orang	
	Jumlah lanjut usia Yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare	Jumlah peserta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	60 Orang	
	Jumlah Lanjut Usia Potensial yang memperoleh Bimbingan Teknis				96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	-	
	Jumlah lanjut usia yang mendapat bimbingan keterampilan dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	60 Orang	
	Jumlah wanita lanjut usia Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare	Jumlah orang Yang mendapatkan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	60 Orang	
	Jumlah pemulasaran lanjut usia yang meninggal dunia	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	12 Orang	
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)				50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	
	jumlah Pelaksanaan pengawasan gelandangan dan pengemis	Jumlah peserta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi			200 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali	-	
	Jumlah Korordinasi dan sinkronisasi terkait gelandangan dan pengemis				10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	-	
	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAFZA yang mendapatkan pelayanan dalam panti				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	50 Orang	
	Jumlah wanita tuna susila Yang di sediakan makan dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Provinsi			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	
	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapat pakaian dan perlengkapan pribadi dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Provinsi			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	
	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	

No	Indikator (2021-2023)	Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050-5889 (2023-2024)	SPM	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Catatan Penting
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2				4	5	6	7	8		10
	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang	Jumlah peserta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	
	Jumlah wanita tuna susila yang mendapat bimbingan aktivitas hidup dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	
	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang dipulangkan ke daerah asal			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	
	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan Anak oleh orang tua tunggal				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial				3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	100,00%	
	Jumlah pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal				50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG	43 Orang	
	jumlah Pengangkatan anak antar WNI dalam Home visit dan sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)	Jumlah Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi			50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	43 Orang	
	Jumlah Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)				820 Orang, 150 KUBE, 110 UEP	820 Orang, 150 KUBE, 110 UEP	820 Orang, 150 KUBE, 110 UEP	820 Orang, 150 KUBE, 110 UEP	820 Orang, 150 KUBE, 110 UEP		
	Jumlah eks penyakit kusta yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi			720 orang	720 orang	720 orang	720 orang	720 orang	400 Orang	
	Jumlah pendamping dan operator yang melakukan pendampingan dan pendataan				100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
	Jumlah stakeholder penanganan fakir miskin	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas kabupaten/kota			24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota\	
	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial uang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi			140 UEP, 150 KUBE	140 UEP, 150 KUBE	140 UEP, 150 KUBE	140 UEP, 150 KUBE	140 UEP, 150 KUBE	70 UEP, 110 KUBE	
	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				100%	100%	100%	10%	100%		
	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial				17175 Orang	17175 Orang	17175 Orang	1775 orang	17175 Orang	5900 Orang	
	jumlah persediaan logistik permakanan tanggap darurat dan pasca bencana alam dan sosial Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Provinsi			12000 Orang	12000 Orang	12000 Orang	-	12000 Orang	-	
	jumlah persediaan logistik sandang tanggap darurat dan pasca bencana alam dan sosial Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Provinsi			3400 Orang	3400 Orang	3400 Orang	-	3400 Orang	-	

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan	Iokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	Iokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting	
1	1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
	Sosial											
	Dinas Sosial				55.884.461.765					59.555.748.261		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	100%	2.032.741.721,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	100%	1.892.426.800,00		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%			
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen		144.535.602	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	74.996.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	70 Dokumen	144.535.602	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	70 Dokumen	74.996.900		
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan Kemampuan dari yang ditargetkan	100%	1.888.206.119	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan Kemampuan dari yang ditargetkan	100%	1.817.429.900		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang	1.276.663.623	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang	1.473.352.500		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	100 Keluarga	326.704.581	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	100 Keluarga	249.226.800		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	200 Lembaga	284.837.915	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	200 Lembaga	94.850.600		
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	307.198.764	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	300.285.000		
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	300 Orang		307.198.764	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	300 Orang	300.285.000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	24 Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	300 Orang	307.198.764	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	300 Orang	300.285.000		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	100%	4.447.398.525	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	100%	4.638.929.320		
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
1	1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	115 Orang	442.594.992	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)	115 Orang	559.540.200	
	Penyediaan Alat Bantu	24 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	245.456.000	Penyediaan Alat Bantu	24 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	509.895.200	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24 Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	12.094.792	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24 Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	-	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	24 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 Orang	105.800.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	24 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 Orang	4.930.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	24 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen	79.244.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	24 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen	44.715.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	425 Anak	2.345.012.614	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	325 Orang	2.327.688.320	
	Penyediaan Makanan	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	425 Orang	1.653.320.730	Penyediaan Makanan	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	325 Orang	1.995.419.600	
	Penyediaan Sandang	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	425 Orang	76.083.954	Penyediaan Sandang	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	325 Orang	21.587.800	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	425 Orang	65.570.608	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	325 Orang	20.772.900	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	425 Orang	63.304.422	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	325 Orang	21.610.660	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	425 Orang	144.565.120	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	325 Orang	90.797.660	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	425 Orang	241.657.780	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	325 Orang	31.014.700	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	425 Orang	100.510.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	325 Orang	146.485.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	75 Orang	908.140.586	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)	75 Orang	1.072.308.400	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
1	1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Makanan	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 Orang	608.217.750	Penyediaan Makanan	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 Orang	861.239.600	
	Penyediaan Sandang	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	16.187.400	Penyediaan Sandang	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	7.150.000	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	75 Orang	48.668.000	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	75 Orang	7.035.500	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	75 Orang	31.933.023	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	75 Orang	6.998.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Pare-Pare	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	75 Orang	33.856.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Pare-Pare	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	75 Orang	29.999.000	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kota Pare-Pare	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	55.881.973	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kota Pare-Pare	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	9.999.600	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	49.916.440	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pare-Pare	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	49.915.000	
	Pemulasaraan	Kota Pare-Pare	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	12 Orang	63.480.000	Pemulasaraan	Kota Pare-Pare	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	12 Orang	99.971.700	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam pant (SPM)	60 Orang	126.282.932	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam pant (SPM)	60 Orang	66.104.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24 Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	29.370.080	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24 Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	32.370.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarant di dalam Pant	24 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	2 Dokumen	96.912.852	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarant di dalam Pant	24 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	2 Dokumen	33.734.000	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant		Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan pelayanan dalam pant	100 Orang	625.367.401	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant		Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan pelayanan dalam pant	100 Orang	613.288.400	
	Penyediaan Permakanaan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	405.478.500	Penyediaan Permakanaan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	489.856.600	
	Penyediaan Sandang	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	15.741.982	Penyediaan Sandang	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	6.993.600	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	10.613.856	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.000.000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	100 Orang	16.437.617	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	100 Orang	6.991.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	52.900.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	29.987.400	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	90.127.846	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	9.999.400	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Kota Makassar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	7.617.600	Pemulangan ke Daerah Asal	Kota Makassar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	4.992.000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
1	1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dokumen	26.450.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dokumen	57.468.400	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	100%	3.078.896.524	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	100%	4.690.818.900	
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI sesuai kewenangan provinsi	40 Orang	125.153.465	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI sesuai kewenangan provinsi	40 Orang	130.800.900	
	Pengangkatan Anak antar WNI	24 Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	40 Orang	125.153.465	Pengangkatan Anak antar WNI	24 Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	40 Orang	130.800.900	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Persentase Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100%	2.953.743.059	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Persentase Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100%	4.560.018.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	400 Keluarga	1.004.600.200	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	700 Keluarga	1.288.786.000	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	400 Keluarga	729.070.974	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	400 Keluarga	131.684.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24 Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	110 Orang	1.220.071.885	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24 Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	3.139.548.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	100%	1.306.891.223	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	100%	1.327.503.600	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	3700 Orang	1.306.891.223	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	3700 Orang	1.327.503.600	
	Penyediaan Permakanan	24 Kab/Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	3000 Orang	834.000.000	Penyediaan Permakanan	24 Kab/Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	8928 Orang	916.730.000	
	Penyediaan Sandang	24 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang	170.000.000	Penyediaan Sandang	24 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang	351.257.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	24 Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	302.891.223	Pelayanan Dukungan Psikososial	24 Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	59.516.600	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	116.346.144	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	78.289.000	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	2 Makam	116.346.144	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	2 Makam	78.289.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	116.346.144	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	78.289.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	90 Nilai	44.594.988.864	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	90 Nilai	46.627.495.641	
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	97.2 Nilai				Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	97.2 Nilai		
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	500.219.120	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	545.210.138	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Iokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	Iokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
1	1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	352.582.626	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300.016.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.085.724	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.864.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.093.130	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.961.300	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.223.156	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.983.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.734	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.999.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	31.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	6.999.750	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	82.920.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	204.384.638	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Laporan	35.952.383.759	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Laporan	39.881.215.113	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/Bulan	35.802.273.502	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/Bulan	39.681.379.413	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	97.210.257	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	99.938.900	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	52.900.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	99.896.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	300.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	61 Unit	1.112.809.614	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	61 Unit	1.053.362.000	
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi	1000 Orang				Jumlah Tamu Yang difasilitasi	1000 Orang		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.580.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16.717.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	261.475.970	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	254.431.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31 Paket	24.799.520	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31 Paket	22.277.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	30.153.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	51.930.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.153.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	121.650.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	705.648.124	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	586.356.400	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	lokasi kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
1	1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	5.741.320.790	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	4.584.392.795	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	692.348.964	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	637.200.906	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.048.971.826	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.947.191.889	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	158 Unit	988.255.581	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	158 Unit	563.315.595	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	306.830.580	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	379.290.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	23.276.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	35.593.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	35.072.700	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	36.802.595	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.160.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	39.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	575.466.301	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	71.730.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	26.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	-	
			JUMLAH		55.884.461.765			JUMLAH		59.555.748.261	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang merupakan Usulan Dari Ir. H. Rusdin Tabi, MBA
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		Pemodalan Kerja dan Bahan Baku bagi peningkatan ekonomi keluarga yang merupakan Usulan Dari Haidar Majid, S.Sos
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		Hibah bantuan alat bantu bagi disabilitas dan Lanjut Usia dalam meningkatkan daya tahan hidup dan produktifitas masyarakat disabilitas dan Lanjut Usia yang merupakan Usulan Dari Haidar Majid, S.Sos
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Peningkatan pencegahan penanganan stunting yang merupakan Usulan dari Risfayanti Muin, SS
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang merupakan usulan dari DR. H. Husmaruddin, SE, MM
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Maros, Kab. Pangkep dan Kota Pare-Pare	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		Bantuan Modal Usaha yang merupakan usulan dari Ir. Andi Muhammad Irfan AB
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Peningkatan Pencegahan Stunting yang merupakan usulan dari Ir. Andi Muhammad Irfan AB
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sesuai Konstituen Anggota Dewan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Peningkatan Pencegahan Stunting yang merupakan usulan dari Andi Izman Maulana Padjalangi, SH, MH
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Bulukumba	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang merupakan Usulan dari Andi Muh. Anwar Purnomo, SH, MH
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Bulukumba dan Kab. Sinjai	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Peningkatan Pencegahan Stunting yang merupakan usulan dari Andi Muh. Anwar Purnomo, SH, MH
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Tana Toraja	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		Alat Bantu Bagi Disabilitas
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Selayar	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
13	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Enrekang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		Alat Bantu Bagi Disabilitas

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Palopo	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	250 KK	Penyediaan Logistik Bencana
15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Palopo	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	100 Orang	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
16	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Palopo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	200 Orang	Alat Bantu Bagi Disabilitas dan Lanjut Usia
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Toraja Utara	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	10 Kelompok	Fasilitasi Bantuan Pengembagna Ekonomi Produktif
18	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Toraja Utara	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	77 Orang	Alat Bantu Bagi Disabilitas
19	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Toraja Utara	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)		Penyediaan Logistik Bencana

TABEL T.C 33
RENJA
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
1.01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.01	06	Sosial							
1.01	06	Dinas Sosial			55.905.748.261				56.884.561.763
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100%	539.395.800,00			100%	1.574.857.230,90
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		70 Dokumen	74.996.900			70 Dokumen	148.497.353
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24 Kab/Kota	70 Dokumen	74.996.900			70 Dokumen	148.497.353
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		100%	464.398.900			100%	1.426.359.878
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	200 Orang	120.321.500			200 Orang	797.952.134
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	100 Keluarga	249.226.800			100 Keluarga	335.659.622
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	200 Lembaga	94.850.600			200 Lembaga	292.748.123
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		100%	300.285.000			100%	315.619.146
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		300 Orang	300.285.000			300 Orang	315.619.146

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	300 Orang	300.285.000			300 Orang	315.619.146
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti		100%	4.558.306.019			100%	4.572.302.666
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		100%				100%	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		100%				100%	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		100%				100%	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		100%				100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)		115 Orang	357.156.400			115 Orang	464.248.690
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	45 Orang	307.683.200			45 Orang	252.184.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	50 Orang	-			50 Orang	21.948.390
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	20 Orang	4.758.200			20 Orang	108.700.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	24 Kab/Kota	2 Dokumen	44.715.000			2 Dokumen	81.416.300
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)		325 Orang	2.449.099.769			425 Anak	2.409.289.897
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	2.015.969.600			425 Orang	1.698.638.595
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	20.040.800			425 Orang	78.169.431

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	27.772.400			425 Orang	67.367.912
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	28.973.469			425 Orang	65.039.609
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	119.542.500			425 Orang	148.527.680
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	41.181.000			425 Orang	248.281.670
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	325 Orang	195.620.000			425 Orang	103.265.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)		75 Orang	1.069.009.450			75 Orang	933.032.908
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	861.239.600			75 Orang	624.889.125
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	7.109.000			75 Orang	16.631.100
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	5.488.900			75 Orang	50.002.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	5.286.650			75 Orang	32.808.313
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	29.999.000			75 Orang	34.784.000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	9.999.600			75 Orang	57.413.710
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	75 Orang	49.915.000			75 Orang	51.284.660

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Kota Pare-Pare	12 Orang	99.971.700			75 Orang	65.220.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)		60 Orang	66.104.000			60 Orang	123.222.320
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	60 Orang	32.370.000			60 Orang	30.175.120
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	24 Kab/Kota	2 Dokumen	33.734.000			2 Dokumen	93.047.200
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan pelayanan dalam panti		100 Orang	616.936.400			200 Orang	642.508.852
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	100 Orang	489.856.600			100 Orang	416.592.750
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	100 Orang	6.993.600			100 Orang	16.173.473
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	100 Orang	7.000.000			100 Orang	10.904.784
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	100 Orang	6.314.000			100 Orang	16.888.176
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	100 Orang	29.987.400			100 Orang	54.350.000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	100 Orang	14.551.400			100 Orang	92.598.269
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Kota Makassar	100 Orang	4.765.000			100 Orang	7.826.400
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Makassar	2 Dokumen	57.468.400			2 Dokumen	27.175.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan		100%	2.589.265.900			100%	2.882.239.109

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI sesuai kewenangan provinsi		40 Orang	130.800.900			40 Orang	128.583.948
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	40 Orang	130.800.900			40 Orang	128.583.948
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		100%	2.458.465.000			100%	2.753.655.161
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	700 Keluarga	1.288.786.000			400 Keluarga	1.004.600.200
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	400 Keluarga	169.679.000			400 Keluarga	749.054.961
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	500 Orang	1.000.000.000			110 Orang	1.000.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)		100%	1.327.503.600			100%	1.315.193.534
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial		3700 Orang	1.327.503.600			3700 Orang	1.315.193.534
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	8928 Orang	916.730.000			3000 Orang	834.000.000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	500 Orang	351.257.000			500 Orang	170.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	24 Kab/Kota	200 orang	59.516.600			200 orang	311.193.534
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan		100%	78.289.000			100%	119.535.216
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan		2 Makam	78.289.000			2 Makam	119.535.216
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Makassar	2 Makam	78.289.000			2 Makam	119.535.216
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah		90 Nilai	46.512.702.942			90 Nilai	46.104.814.861
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		97.2 Nilai				97.4 Nilai	
		Persentase Temuan ERP yang Selesai Ditindaklanjuti		100%				100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19 Dokumen	530.773.375			19 Dokumen	513.930.230

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	301.918.650			2 Dokumen	362.246.989
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	13.225.300			1 Dokumen	11.389.586
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	9.848.841			1 Dokumen	11.397.195
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	14.933.500			1 Dokumen	6.393.734
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	8.416.050			1 Dokumen	4.699.101
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	7 Laporan	8.571.034			7 Laporan	32.610.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Laporan	173.860.000			6 Laporan	85.193.625
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Laporan	39.881.215.113			30 Laporan	37.616.525.549
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sulawesi Selatan	330 Orang/Bulan	39.681.379.413			330 Orang/Bulan	37.462.300.739
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	18 Laporan	99.938.900			18 Laporan	99.874.810
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	99.896.800			12 Dokumen	54.350.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan	2.201.000			1 Laporan	16.012.070
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	2.201.000			1 Paket	16.012.070
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum		61 Unit	1.052.362.000			61 Unit	1.044.311.553
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi		1000 Orang				1000 Orang	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Paket	16.717.400			10 Paket	10.870.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Paket	254.431.000			10 Paket	165.032.688
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Selatan	31 Paket	22.277.200			31 Paket	25.479.280
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Paket	51.930.000			10 Paket	30.979.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	120.650.000			12 Laporan	86.960.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan	300 Laporan	586.356.400			300 Laporan	724.990.085
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 Laporan	4.584.401.059			24 Laporan	5.898.691.587
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	637.209.170			12 Laporan	711.326.393
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	3.947.191.889			12 Laporan	5.187.365.193
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		158 Unit	461.750.395			158 Unit	1.015.343.872
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Sulawesi Selatan	7 Unit	279.930.000			7 Unit	315.240.870
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Sulawesi Selatan	7 Unit	35.593.000			7 Unit	23.914.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	110 Unit	36.802.595			110 Unit	36.034.050
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	39.900.000			1 Unit	21.740.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Unit	69.524.800			3 Unit	591.239.952
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sulawesi Selatan	30 Unit	-			30 Unit	27.175.000